KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

DFDWSGOR

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 FINAL/TIDAK FINAL

1721-B1

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		H.1 NOMOR : 2 0 0 0 0 0 1 8 0 H.2 X Pembetulan Ke- 0 H.3 Pembatalan					
A. IDENTITAS F	PENERIMA PENGHASIL	AN YANG DIPOTONG					
A.1 NPWP : 1 5 2 4 9 6 6 7 7 2 2 0 0 0							
A.2 NIK :							
A.3 Nama : CITRALIA JANUARTY							
B. PPh PASAL 21 YANG DIPOTONG							
MASA PAJAK (mm-yyyy)	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER- NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG/DTP (Rp)	
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6	B.7	
2	21-402-01	7.945.000	7.945.000	0	5	397.250	
Honor dan Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS, Anggota B.8 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen Nama Dokumen Nama Dokumen Nama Dokumen PPh Pasal 21 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Pembebasan ini berdasarkan SKB. Nomor : Tanggal dd mm yyyyy B.10 PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan : B.11 PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan : C. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK							
C.1 NPWP Instansi Pemerintah : C.2 Nama Instansi Pemerintah :		9 5 3 3 5 0 1 6 2 7 2 2 0 0 0 0 RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR					
C.4 Tanggal	-	1 1 dd 0 2 mm	2 0 2 2 yyyy		шш		
	: andatangan :	—— ——		AM PROVINSI K	ALIMANTAN	TIMUR	
C.6 Pernyataa	TOWN I GARLING WAY BY COMMITTEE WAY WAY TO SHAPE WAY TO S						
		Sesuai dengan ketentuan yang elektronik sehingga tidak diperl	berlaku, Direktorat Jenderal Pajak ukan tanda tangan.	r mengatur bahwa d	dokumen ini tel	ah ditandatangani secara	